

BAB III

REAKSI DUNIA INTERNASIONAL DAN RESPON TURKI

Pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang mendapat perhatian dan kecaman dari berbagai negara di dunia dan lembaga internasional yang menangani berbagai macam konflik dibidang pelanggaran HAM, dalam hal ini Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut memberikan respon dan juga memberikan kecaman terhadap pelanggaran HAM tersebut. Pelanggaran HAM yang dirasakan etnis Uighur mendapat berbagai respon dari dunia internasional, hal ini dikarenakan kekerasan yang dirasakan Uighur merupakan pelanggaran HAM berat.

A. Respon Negara-Negara di Dunia

Dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang mendapat bermacam respon dari dunia internasional, beberapa pemimpin negara internasional memberikan respon mulai dari sebuah pernyataan keras kepada pemerintahan Tiongkok maupun sebuah tindakan dan juga kecaman, namun, terdapat beberapa negara yang membela tindakan yang dilakukan Tiongkok dan beberapa negara Muslim besar tidak memberikan respon. Negara dan juga pemimpin yang ikut merespon perlakuan Tiongkok diantaranya:

1. Amerika Serikat

Negara superpower ini mengeluarkan kecaman terhadap Tiongkok dengan mempertimbangkan untuk memberi sanksi kepada pejabat-pejabat senior di Tiongkok dan perusahaan-perusahaan yang ikut serta memberikan kontribusinya dalam pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas muslim uighur. Para Parlemen Amerika Serikat juga memberikan desakan kepada Presiden AS untuk memberikan sanksi terhadap ketua

partai komunis di Xinjiang yaitu Chen Quanguo, anggotanya dan pejabat-pejabat Tiongkok yang ikut bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukan. Pihak Amerika Serikat sendiri akan memberikan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act, Undang-Undang federal yang memungkinkan pemerintah AS menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukumannya adalah dengan membekukan aset, larangan perjalanan, dan larangan orang Amerika Serikat melakukan bisnis dengan mereka termasuk salah satunya yaitu larangan AS untuk mengekspor teknologi yang digunakan Tiongkok untuk mengawasi dan penahanan muslim uighur secara massal. (Republika, 2018).

2. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara islam terbesar didunia. Namun, sikap yang diberikan Arab Saudi berbanding berbalik dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Hal ini terlihat dari pernyataan yang diberikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman, Mohammed mengatakan bahwa perlakuan yang dilakukan Tiongkok merupakan sebuah hak yang dimiliki Tiongkok untuk mengatur dan menjaga keamanan Nasional negaranya. Putra mahkota Arab Saudi menyambut baik perlakuan Tiongkok untuk membuat Kamp-Kamp konsentrasi untuk Uighur di Xinjiang (Dayana, 2019).

3. Indonesia

Indonesia yang telah bergabung kedalam Anggota tidak tetap PBB dan juga dijuluki sebagai kakak tertua ASEAN hingga saat ini belum menunjukkan sikap dalam menyikapi permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Tiongkok, hal ini di dasari karena Indonesia bergantung terhadap ekonomi Tiongkok. Indonesia bisa saja menggunakan kekuatannya sebagai anggota ASEAN dan juga sebagai anggota tidak tetap PBB jika memang memiliki keinginan kuat, dengan kekuatan yang dimilikinya Indonesia bisa menarik negara-negara islam besar yang tergabung di PBB, ASEAN dan OKI untuk ikut membahas permasalahan Xinjiang.

Pemerintah Indonesia menyampaikan respon keprihatinan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada muslim uighur. Pelanggaran Hak Asasi Manusiayang dilakuka Tiongkok dinilai pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah merenggut Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan dalam beragama dan kepercayaan. Juru bicara kementerian luar negeri juga menyampaikan secara langsung kepada duta besar Tiongkok yang berada di Jakarta tentang keprihatinan akan kondisi etnis uighur di Tiongkok. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialami muslim uighur dan menyatakan sikap bahwa iya tidak setuju dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan Jusuf Kalla sendiri pasti tidak akan menerima penindasan tersebut terjadi dan iya mengatakan bahwa secara umum penghentian pelanggaran hak asasi manusia dimana pun harus tetap diperjuangkan.

Kasus hak asasi manusia ini merupakan masalah internal pemerintah Tiongkok dengan penduduknya, Jusuf Kalla merasa Indonesia tidak perlu mencampuri urusan internal yang ada didalam pemerintahan Tiongkok. Sejumlah organisasi islam di Indonesia ikut menyerukan kecamannya dalam pelanggaran tersebut. Beberapa diantaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa organisasi massa sepeti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan juga pemerintah daerah seperti walikota Banda Aceh dan kota-kota yang bermayoritas penduduk muslim di Indonesia turut menentang dengan menyerukan aksi “Bela Muslim Uighur” (Mata Mata Politik, 2018).

Presiden Jokowi ingin agar ketertarikan Tiongkok terhadap Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya kerjasama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain dalam segi ekonomi, Indonesia memiliki ketergantungan lain dengan Tiongkok dalam hal sektarian. Dengan begitu Indonesia harus melakukan soft diplomacy terhadap Tiongkok berupa dialog serta membujuk Beijing untuk menjelaskan situasi terkini di Xinjiang daripada memberi teguran keras

yang dapat berakibat buruk bagi hubungan antara dua negara tersebut.

Walaupun upaya yang dilakukan Jokowi tidak membantu tapi setidaknya yang dilakukan Jokowi tersebut dapat ditunjukkan kepada publik tentang upayanya untuk membantu muslim uighur di Xinjiang (Suastha, 2018).

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) Indonesia yang bernama Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan bantuannya kepada muslim uighur dengan mengirim para relawan ke 5 negara yang diantara lain yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, Turki dan tentu di Xinjiang, Tiongkok. Pada negara-negara yang di fokuskan tersebut terdapat banyak pengungsi muslim uighur yang membutuhkan bantuan. Sedangkan untuk di Turki ACT sudah memiliki kantor dan tinggal menjalankan program yang sudah ada serta meningkatkan jumlah bantuan yang akan disalurkan. ACT Turki telah memberikan bantuan kepada anak-anak muslim uighur berupa beasiswa untuk 100 anak beserta kebutuhannya (Kumparan, 2018).

4. Malaysia

Malaysia yang dipimpin oleh Mahatir Mohamad melakukan langka yang berbeda didalam menanggapi pelanggaran HAM di Tiongkok. Malaysia membebaskan 11 narapidana Muslim Uighur yang berhasil kabur dari sebuah penjara di Thailand pada tahun 2017 dan mengabaikan ekstradisi dari Tiongkok dan juga mengabaikan resiko yang selama ini difikirkan oleh negara muslim ASEAN, Malaysia memutuskan untuk memulangkan mereka ketanah yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan yakni turki karena mereka mengaku bertanah air Turki. Keputusan yang diambil perdana menteri Malaysia ini memperkeruh hubungan malaysia dan Tiongkok (CNN Indonesia, 2018).

Perdana menteri Malaysia yakni Mahatir Mohamad saat ini lebih memperhatikan, mengutamakan dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang dirampas oleh Tiongkok untuk muslim Uighur ketimbang hubungan diplomatik Malaysia terhadap Tiongkok. Pemerintahan baru

yang saat ini dipimpin Mahatir lebih independen terhadap Tiongkok, hal ini terbukti dengan langkah-langkah baru yang diambil Mahatir yakni menganalisis dan membuat peraturan baru tentang hubungan dengan Tiongkok yang mana pada pemerintahan sebelumnya merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri. Mahatir pun tidak ragu dalam membela Hak Uighur dan juga menjauhkan negara nya dari jeratan Tiongkok, hal ini terbukti pada kebijakan Mahatir yang membatalkan proyek yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya senilai 23 Milyar Dolar AS (Mata Mata Politik, 2018).

B. Respon Badan Internasional

Badan Internasional yang terlihat mengancam tindakan pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim uighur yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Kepala badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar pemerintah Tiongkok membuka akses bagi staffnya dan mengizinkan tim monitor masuk ke Tiongkok yang bertujuan untuk mengecek tuduhan-tuduhan terkait penerapan kamp-kamp bagi muslim uighur dengan indoktrinasi politik yang tentunya sangat mengkhawatirkan. Badan PBB mengeluarkan beberapa statement atas pengamatannya terkait dengan kritikan “definisi terorisme, ekstrimisme dan separatisme dalam undang-undang Cina. Berikut beberapa statment yang dikeluarkan oleh PBB :

1. Mengakhiri penahanan dan dakwaan hukum tanpa vonis yang jelas terhadap muslim uighur
2. Muslim uighur yang ditahan di kamp-kamp segera dibebaskan dan mendapatkan haknya kembali
3. Memberikan alasan mengapa muslim uighur ditahan dan data jumlah orang yang berada dalam penahanan
4. Melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terkait ras, suku, dan agama.

Dalam beberapa statement tersebut PBB masih terus mendesak agar hal tersebut benar-benar dilakukan oleh

Tiongkok, hal ini dikarenakan adanya bantahan Tiongkok tentang penindasan yang dilakukan oleh partai komunis yang berada di Xinjiang. Bahkan beberapa tahanan tidak ditemukan memiliki bukti bersalah dan tidak ada vonis jelas sampai kapan penahanan yang diberi dan atas kesalahan apa mereka ditahan. Para tahanan dipaksa untuk meriakkan slogan partai komunis dan juga tidak diberi makan yang cukup. Human Right watch memberikan laporan kepada komite PBB bahwa tahanan massal dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, mengabdikan dengan sepenuh hati kepada partai komunis dan melakukan sumpah setia kepada presiden Tiongkok, Xi Jinping (Hughes R., 2018).

Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mendesak Tiongkok bersikap serius dalam masalah ini, PBB juga meminta agar Tiongkok membuka akses yang masuk kedalam kamp konsentrasi yang berada di wilayah Otonomi Xinjiang. Hal ini dilakukan dikarenakan Tiongkok seolah-olah menutupi apa yang terjadi di daerah tersebut sehingga tim investigasi PBB sulit untuk melihat langsung apa yang terjadi di kamp tersebut. PBB mengaku merasa terusik dengan banyaknya laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok, sebab menurut laporan yang didapat warga yang pernah dimasukkan kesana dalam seluruh etnis Uighur yang memeluk agama Islam dan juga mereka dipaksa memahami semua propaganda Partai Komunis Tiongkok (CNN Indonesia, 2018).

Tekanan yang dilakukan oleh PBB ini didasari oleh adanya perlakuan kurang menyenangkan yang dilakukan Tiongkok terhadap utusan PBB yakni Komisioner kebijakan HAM Jerman Barbel Kofler, dengan adanya perlakuan ini dan laporan yang telah didapat Tiongkok seolah-olah menjadi negara yang anti kritik aktifis dan berimbas kepada penerapan HAM di Tiongkok. Hal serupa juga terjadi dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Markas PBB di New York, dalam rapat tersebut sejumlah negara mendesak agar Tiongkok menghentikan pelanggaran dan diskriminatif yang mereka lakukan terhadap Uighur dan penggiat HAM. Namun, Tiongkok menyangkal dan berdalih bahwa yang

mereka lakukan adalah benar dan mengabaikan tekanan yang diberikan negara-negara lain dan mengatakan bahwa catatan penerapan HAM yang terjadi di Tiongkok baik-baik saja dan juga meningkat selama beberapa tahun terakhir (CNN Indonesia, 2018).

C. Respon dan Tindakan Turki

Negara muslim yang sangat menentang dengan keras pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok adalah Turki. Presiden Turki mengatakan bahwa perlakuan Tiongkok terhadap etnis minoritas yakni Muslim Uighur merupakan sebuah penghinaan besar bagi kemanusiaan. Juru bicara kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan bahwa bukan sebuah rahasia lagi bahwa Tiongkok secara terang-terang menahan lebih dari satu juta warga muslim Uighur didalam kamp-kamp konsentrasi. Dilain waktu presiden Turki saat ini Recep Tayyip Erdogan pernah menuduh bahwa Tiongkok melakukan genosida. Namun, setelah mengeluarkan pernyataan tersebut Turki menjalني Hubungan diplomati dan ekonomi yang lebih dekat dengan Tiongkok (Al Jazeera, 2019).

Pemerintahan Turki meminta Tiongkok menutup semua pusat indroktinasi yang melibatkann etnis Uighur, tindakan yang diambil pemerintahan Turki ini merupakan sebuah tindakan yang sangat langka dilakukan oleh negara muslim besar yang ada didunia. Turki bergabung dengan beberapa negara internasional lainnya yang mengutuk perlakuan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Tindakan yang dilakukan Pemimpin Turki saat ini yakni Recep Tayyip Erdogan menandai bahwa terdapat perubahan haluan untuk zona pemerintahan dan partai yang berkuasa, sebelumnya pemerintah Turki diam terhadap perlakuan Tiongkok dengan Uighur meskipun meningkatnya berita-berita dimedia internasional dan tekanan dari partai oposisi Turki (Shih, 2018).

Pemerintah Turki mengatakan belajar dari kesedihan yang mendalam dalam kasus kematian penyair terkenal Uighur

Abdurehin Heyit yang sebelumnya ditahan di dalam Kamp penahanan milik Tiongkok, pemerintah Turki mengatakan tindakan yang mereka ambil ini untuk memperingati perjuangan Heyit dan mereka yang berjuang demi membela identitas Turki dan Muslim. Aktivis yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak Uighur memuji tindakan Turki dalam memperjuangkan Uighur, alasan mengapa Turki baru mengeluarkan pernyataan dan memberikan tindakan dikarenakan Turki di awal pemerintahan Erdogan sedang mengumpulkan semua bukti kekerasan dan pelanggaran HAM Tiongkok dan akhirnya setelah menemukan semua bukti yang ada Turki dan juga Erdogan menyatakan bahwa mereka adalah pemimpin dunia Muslim dan membelah rakyat hak muslim dan Uighur yang ada di dunia (Shih, 2018).

Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp penampungan Tiongkok yang berhasil kabur berkat beberapa negara dan akhirnya bisa kembali ke kampung halaman mereka yakni Turki disinyalir berkat bantuan pemerintah Turki di berbagai Negara, dua tahun terakhir ribuan etnis minoritas etnis Muslim Uighur berhasil kabur setelah sebelumnya melarikan diri ke negara disekitar Tiongkok, hal ini membuat Tiongkok berang dan menuduh Tiongkok membantu warganya kabur secara ilegal. Pejabat tinggi Turki membantah berperan dalam membantu pelarian etnis Uighur tersebut, namun dokumen dokumen yang ditemukan yang diberi label “Dokumen Perjalanan orang asing darurat Republik Turki” menunjukkan sebaliknya (Reuters, 2015).

Seorang etnis Uighur yang berhasil kembali ke Turki dengan selamat melalui jalur Malaysia mengatakan bahwa ia diberi sebuah kertas yang berisikan dokumen-dokumen lainnya untuk dirinya dan ketiga anaknya yang diberikan oleh seorang diplomat di Kedutaan Besar Turki yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. Warga Uighur yang berhasil kabur mengatakan untuk bisa berada di Kuala Lumpur ia dibantu oleh bantuan penyelundupan Manusia melalui Kamboja, Vietnam dan terakhir Thailand. Dokumen-Dokumen yang diberikan oleh diplomat tersebut hanya valid untuk berpergian

ke Negara Turki saja. Beberapa warga Uighur yang sebelumnya telah selamat sampai di Turki juga mengatakan hak yang sama, mereka membayar jasa penyelundupan manusia untuk bisa keluar dari Tiongkok dan dipertengahan jalan mereka diberi dokumen-dokumen untuk kembali ke Turki (Reuters, 2015).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berada di Tiongkok dengan membawa 100 pemimpin bisnis dan juga investor dengan tujuan kunjungan kenegaraan yang diarahkan untuk berfokus kedalam hubungan ekonomi, namun pertemuan ini akan diwarnai pembahasan mengenai sikap dan perlakuan terhadap Uighur. Erdogan membahas terkait meningkatnya ketegangan kedua negara terkait perlakuan cina terhadap suku minoritas Uighur yang beragama muslim, hal yang mendasari adanya pembahasan ini didalam pertemuan ekonomi Erdogan dan Tiongkok adalah karena di beberapa waktu sebelumnya telah terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa wilayah Turki yakni Istanbul dan Ankara yang diberinama demonstran anti Cina yang sebagai berakhir kekerasan. Demonstrasi yang terjadi di Turki ini disebabkan oleh adanya diskriminasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur yang dilarang untuk berpuasa dibulan Ramadhan (BBC, 2015).

Turki terkenal sebagai negara kuat yang membela hak-hak muslim dunia. Turki memiliki peran penting dalam membantu etnis Uighur untuk mendapatkan haknya kembali, selain mengkecam pemerintah turki turut mengambil sikap yakni membantu etnis Uighur dan memberikan tempat kepada kaum Uighur yang berhasil melarikan diri dar penahan pemerintah Tiongkok. Beberapa hal yang dilakukan Turki yakni pernah menyediakan pesawat sewaan pribadi yang bertujuan untuk memberangkatkan etnis Uighur yang berhasil kabur dari kamp-kamp penahanan Uighur dan sedang berada di Thailand. Hal ini membuat Tiongkok meradang dan mengeluarkan pernyataan bahwa Tiongkok menentang segala tindakan yang bertujuan membantu imigran ilegal dan meyakini komunitas internasional memiliki tanggung jawab dalam memberantas imigran ilegal (Armandhanu, 2015).